

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH**



Disusun oleh:

**Cut Chelsi Rezki M
NIM. 170604001**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cut Chelsi Rezki M
NIM : 170604001
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Cut Chelsi Rezki M

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKIRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi
Dengan Judul :

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi
Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh:

Cut Chelsi Rezki M
NIM. 170604001

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II

Abrar Amri, M.Si
NIDN. 122078601

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Cut Chelsi Rezki M
NIM. 170604001

Dengan Judul:

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Juli 2022 M
22 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005

Sekretaris,

Winy Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

Penguji I

Jariah Abu Bakar, S.E., M.Si
NIP: 197508282005012001

Penguji II,

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam
UIN Ar-Raniry banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Chelsi Rezki M
NIM : 170604001
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 170604001@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi
Yang berjudul:

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2022


Mengetahui


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Cut Chelsi Rezki M
NIM.170604001


Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si
NIP. 197204281999031005


Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh". Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besarkita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, Marwiyati, SE., M.M selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Abrar Amri, M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi.
6. Seluruh dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ilmu Ekonomi selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahnda T. Kasmir (Alm) dan Ibunda Enda Suarni serta kakak Cut Olvi Mirda dan Abang T. Izqal Fitriadi M. yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Putri Agesta S.E, Zarrah, Fani Awindi, Harris Septyawan, Raja Arif Munandar, Arinal Marthazulha S.E dan seluruh teman-

teman angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin YaRabbal‘alamin.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Penulis,

Cut Chelsi Rezki M

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathahdan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

<i>qāla</i>	:	قَالَ
<i>ramā</i>	:	رَمَى
<i>qīla</i>	:	رَمَى
<i>yaqūlu</i>	:	يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudahal-atfāl/ raudatulatfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnahal-Munawwarah /</i>		
<i>alMadīnatul Munawwarah</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>Talḥah</i>	:	طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.

ABSTRAK

Nama : Cut Chelsi Rezki M.
NIM : 170604001
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/IllmuEkonomi
Judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Aceh
Pembimbing 1 : Dr.Muhammad Adnan, SE.,M.Si
Pembimbing 2 : Abrar Amri, M.Si

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur suatu proses keberhasilan output dari waktu ke waktu menjadi sebuah indikator penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, baik itu secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data skunder. Data yang digunakan berupa data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh selama 30 tahun, dari tahun 1992-2021. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Dana Alokasi Umum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh tahun 1992-2021. Diharapkan untuk pemerintah agar terus meningkatkan penerimaan pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah supaya menciptakan kemandirian daerah, selain itu pemerintah daerah provinsi Aceh juga harus mengelola Dana Lokasi Umum dengan tepat sasaran.

KataKunci: *Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,dan Pertumbuhan Ekonomi*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.1 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	23
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	30
2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	31
2.3 Dana Alokasi Umum	33
2.3.1 Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Umum Secara Nasional dan Secara Daerah.....	35

2.3.2 Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Umum Secara Daerah	38
2.3.3 Tujuan Dana Alokasi.....	40
2.4 Penelitian Terkait.....	40
2.5 Kerangka Pemikiran	46
2.6 Hipotesis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Desain Penelitian	51
3.2 Jenis dan Sumber Data	51
3.3 Teknik Pengambilan Data	52
3.4 Definisi dan Operasional Variabel	53
3.5 Teknik Analisis Data	53
3.5.1 Uji Asumsi Klasik.....	54
3.5.2 Regresi Linier Berganda	54
3.6 Pengujian Hipotesis	57
3.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	57
3.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji f)	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	60
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh	61
4.1.3 Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh.....	62
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
4.4 Pengujian Hipotesis	68
4.4.1 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)	68
4.4.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)	69
4.4.3 Koefisien Determinasi.....	69
4.5 Hasil dan Pembahasan.....	70
4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	70
4.5.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	71

BAB V KESIMPULAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

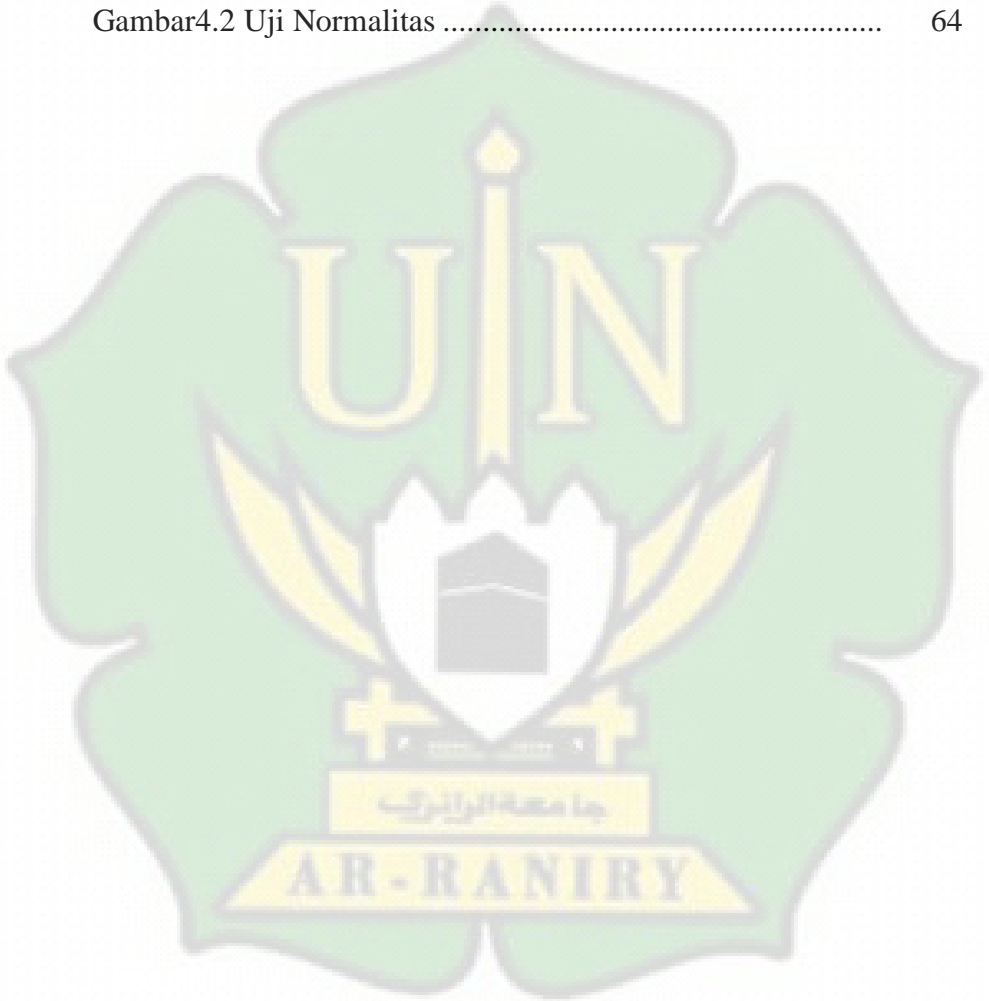


DAFTARTABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021	3
Tabel 1.2	Produk Domestic Regional Bruto Tahun 2016-2020	6
Tabel 1.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh (Triliun Rupiah) Tahun 2016–2020.....	8
Tabel 1.4	Perkembangan Dana Alokasi Umum Aceh Tahun 2016-2020	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1	Data dan Variabel	42
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2011-201	53
Tabel 4.2	Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh 2011-2021	61
Tabel 4.3	Tabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh Tahun2011– 2021 (Rupiah).....	62
Tabel 4.4	Data Deskriptif.....	63
Tabel 4.5	Uji Multikolinieritas	65
Tabel 4.6	Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.7	Uji Autokolerasi.....	66
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linier Berganda.....	67

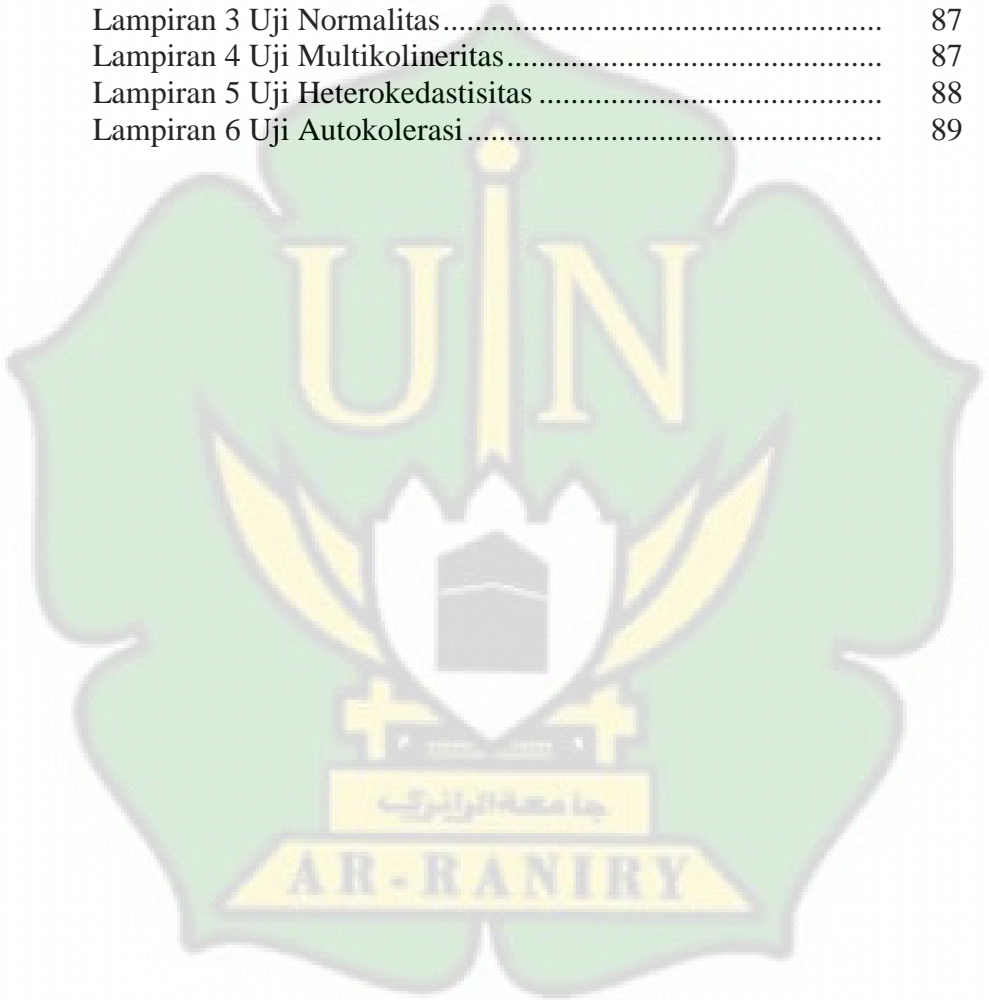
DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Kerangka Penelitian.....	49
Gambar4.1 Peta Lokasi Penelitian.....	60
Gambar4.2 Uji Normalitas	64



DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1 Data Olahan.....	85
Lampiran 2 Hasil Regresi Linier Berganda	86
Lampiran 3 Uji Normalitas.....	87
Lampiran 4 Uji Multikolinieritas.....	87
Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas	88
Lampiran 6 Uji Autokolerasi.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

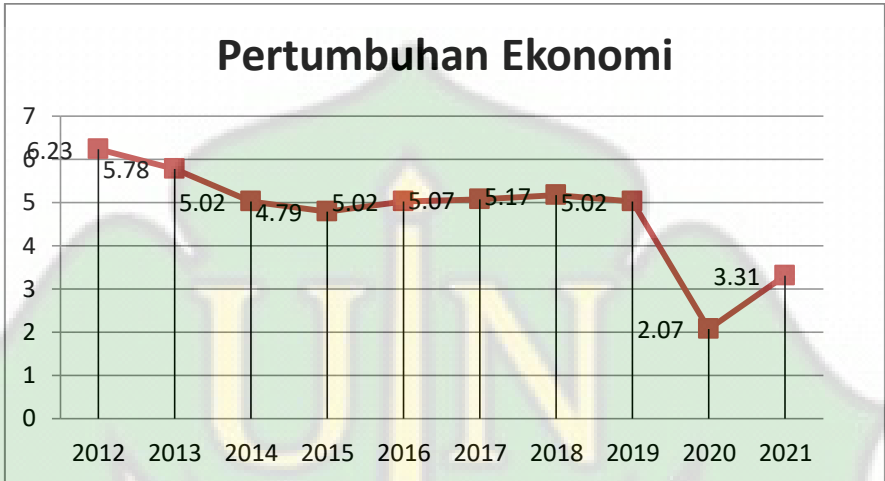
1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur suatu proses keberhasilan output dari waktu ke waktu menjadi sebuah indikator penting dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari sebuah pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kesejahteraan suatu perekonomian dapat ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang dilihat dari output nasional dan jika terjadinya perubahan output dalam perekonomian menunjukkan bahwa analisis ekonomi jangka pendek (Ma'aruf & Wihastuti, 2019). Untuk mencapai suatu sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan ketersediaan dalam mengakses kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu yang menunjukkan dimana aktivitas perekonomian akan dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Rori, Luntungan & Niode, (2016) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara yang

berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata maupun kerja meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan melaksanakan pertumbuhan ekonominya secara berencana atau secara bertahap, Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari campur tangan dari luar negeri maupun dalam negeri gunanya untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonominya. Menurut Sukirno, (2014) terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : (1.) Peningkatan produksi, untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu barang dan jasa (2.) jumlah penduduk, untuk perhitungan jumlah penduduk yang dihitung melalui sensus penduduk dan (3.) Kemajuan teknologi, dapat memperoleh informasi secara otonom. Dengan mengetahui faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut, maka lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari pergerakan produk domestik bruto (PDB) pada Tabel 1.1 di bawah ini :

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Pada Tabel 1.1 selama kurun waktu dari tahun 2012-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 6,23 Indonesia mampu menekan tingkat inflasi pada tahun tersebut di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian sehingga pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditompangi oleh permintaan domestik yang kuat hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah pada tahun 2020 terjadinya penurunan, ini disebabkan karena adanya covid-19, sehingga perekonomian didunia mengalami kontraksi yang sangat drastis dan berdampak ke Indonesia. Pada tahun selanjutnya 2021

pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali kenaikan sebesar 3,31 persen. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang mendorong kembali pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan mengonsumsi barang dan jasa sehingga sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran dan produksi, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dari 2012-2021 sebesar 4,748 persen.

Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2020).

Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, pada tahun 2021 dari sisi pengeluaran ekonomi Aceh triwulan I-2021 terhadap triwulan 2020 (y-on-y) mengalami penurunan sebesar 1,95 persen.

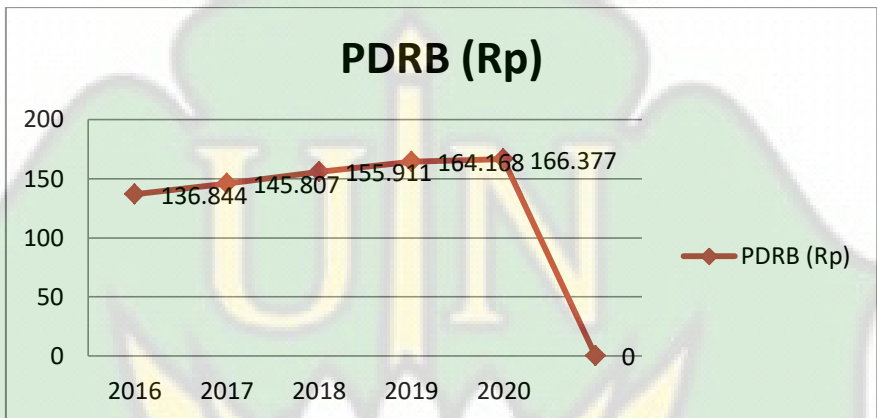
Penurunan ini hampir terjadi kepada semua komponen, kecuali pada pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu tumbuh sebesar 61,66 persen. Salah satu faktor kenaikan pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu, peningkatan realisasi belanja terkait dengan pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Provinsi Aceh. Selain itu Aceh juga memiliki sumber daya yang berlimpah yang berpotensi untuk dikembangkan dimana pada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Bukan hanya itu, Aceh juga salah satu daerah yang mendapatkan Otsus atau Dana Otonomi Khusus yang seharusnya jika didistribusikan secara maksimal sekurangnya dapat mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi di Aceh dan keadilan serta pemajuan pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah Aceh harus memperhatikan kembali dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik (BPS, 2021).

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi daerah dilihat pada laju dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah gambaran Produk Domestik Regional Bruto

(PDRBP) atas harga konstan menggunakan tahun dasar untuk perhitungannya dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Grafik 1.2

Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2021)

Dari Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa PDRB di Aceh dari Tahun 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan. PDRB yang terendah pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp136.844 miliar dan yang tertinggi pada Tahun 2020 PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp166.377 miliar. PDRB Aceh rata-rata dari 2016-2020 sebesar Rp153,679 miliar.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dana transfer dan lain lainnya dari pendapatan yang sah. Dengan begitu rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat dari rasio ketergantungan suatu daerah. Hal ini dikarena semakin tinggi rasio pendapatan asli

daerah terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer baik itu pihak pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya (Taras & Artini, 2017).

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali perdanaan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus di pacu pertumbuhannya. Pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa besarnya sumber-sumber keuangan di dalam daerah yang mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Untuk menggali kemampuan dan manfaat potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah secara optimal akan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Sebastianiana & cahyo, 2016).

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya, dengan adanya peningkatan maka ada keberhasilan pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya dan aset pemerintah. Untuk mewujudkan ekonomi daerah yang bertanggung jawab dan nyata, pemerintah Aceh berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan PAD dan mencari sumber-sumber PAD. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam

membayai pemerintah sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah (Dahlia, 2018). Untuk lebih jelasnya, lihat Tabel 1.3 perkembangan pendapatan asli daerah dari Tahun 2016-2020.

Tabel 1.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh (Triliun Rupiah)
Tahun 2016–2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2016	2.060.184.916.328
2017	2.276.305.568.814
2018	2.359.385.393.646
2019	2.698.912.471.144
2020	2.624.349.661.274

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh (2020)

Pada Tabel 1.3 di atas menunjukkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Provinsi Aceh terendah pada Tahun 2016 sebesar 2.060.184.916.328 triliun, sehingga pendapatan asli daerah yang diperoleh terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017-2019 kenaikan sebesar 2.698.912.471.144 triliun sedangkan pada Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mulai kembali naik sebesar 2.624.349.661.274 triliun dibandingkan pada Tahun 2019.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diambil dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam

pembagian dana untuk suatu daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU). “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Halim, 2002).

UU Nomor 9 tahun 2020 tentang “Anggaran pendapatan dan Belanja negara tahun (2021)” menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN kepada daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari dari anggaran perintah belanja Negara di alokasi kan yang bertujuan untuk pemeretaan keuangan antar daerah untuk membuayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat dan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil (Erlina & Rasdianto, 2015). Dana Alokasi Umum ketika terdapat permasalahan pada pemerintah daerah meminta dana alokasi umum tidak sesuai dengan kebutuhan. Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan melalui otonomi khusus pada UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di bawah ini realisasi perkembangan dana alokasi umum Aceh pada Tahun 2016-2020.

Tabel 1.4
Perkembangan Dana Alokasi Umum Aceh (Triliun Rupiah)
Tahun 2016–2020

Tahun	Dana Alokasi Umum
2016	1.263.870.000.000
2017	2.060.263.235.000
2018	2.060.263.235.000
2019	2.322.266.506.000
2020	2.126.193.327.000

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh (2020)

Tabel 1.4 di atas menunjukkan Dana Alokasi Umum mendapatkan dana terbesar dari jenis dana tranfer lainnya dari Tahun ke Tahun. Penyaluran Dana Alokasi Umum tertinggi Pada Tahun 2019 sebesar Rp2.322.266.506.000, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 Tahun 2019 termasuk angka yang tinggi dari tahun sebelumnya yang terlihat menurun dibandingkan tahun 2017-2018 sebesar Rp2.060.263.235.000, sehingga di Provinsi Aceh tidak menggantungkan sumber keuangan utamanya dari dana perimbangan ini, melainkan mengatur strategi agar penerimaan asli daerahnya dapat lebih dioptimalkan.

Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terjadi secara bersamaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang terdapat di setiap daerah. Agar terciptanya ekonomi yang merata, Pemerintah pusat mengeluarkan dana alokasi umum yang merupakan dana tranfer dari pemerintah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam upaya pelaksanaan desentralisasi dan mampu mengatasi terjadinya ketimpangan ekonomi daerah.

Penelitian dilakukan oleh Rizal, Iskandar, & Ritonga (2021) yang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Provinsi Aceh. Hasil penelitian bahwa Pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Nisa (2017), yang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Penelitian yang dilakukan Manulusi, Sinring, & Hasbi (2021), yang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten//Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan Tahar & Zakhiya (2011), yang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang didukung oleh kemandirian daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020), yang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dan begitu juga dengan dana alokasi umum yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang diberi judul : **“Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada di Provinsi Aceh?
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran secara menyeluruh untuk masukan sebagai pengetahuan dalam perpustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi. Berikut adalah manfaat dalam penelitian ini yaitu:

Bagi dinas terkait, sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Bagi pembaca, sebagai bahan acuan bagi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut terkait permasalahan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian akan dibuat menjadi proposal skripsi yang terdiri dari sistematika berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LandasanTeori

Bab ini penulis membahas tentang dasar teori yang diambil dari beberapa literature studi perpustakaan yang menjadi acuan dan digunakan di dalam penulisan penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini menguraikan mengenai rancangan dan lokasi penelitian. Sumber dan jenis data, sampel, teknik untuk memperoleh dan menganalisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini penulis ingin menguraikan mengenai deskripsi dari objek penelitian hasil analisis dan pembahasan dengan komprehensif terkait temuan serta implikasi dari pembahasan tersebut.

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat terkait kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah masalah makro ekonomi jangka panjang dikarenakan dari satu periode ke periode lainnya kemampuan satu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkatkan disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah kualitasnya. Berdasarkan perkembangan kemampuan yang memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan dari faktor-faktor produksi pada umumnya tidak akan selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai suatu gambaran perkembangan perekonomian dari tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno,2014).

pertumbuhan ekonomi adalah dimana adanya kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi karena adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian dari teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor dari keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Meningkatnya suatu perekonomian ditunjukkan oleh besarnya pertumbuhan yang dihasilkan oleh perubahan *output* nasional, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang (Todaro, 2014). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, yaitu output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang yang dimaksud bahwa kenaikan output perkapita yang harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (Latumaerissa, 2015).

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi melainkan juga terdapat kelembagaan-kelembagaan ekonomi sosial modern. Kenyataan ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai sebuah tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya, suatu perekonomian yang mampu terus-menerus tumbuh dalam jangka panjang yang umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi memiliki sifat dinamis, yaitu suatu perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tumbuh dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan bahkan sampai puluhan tahun. Hal tersebut merupakan suatu proses yang mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian menggambarkan bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori pertumbuhan dimana para ekonom mempunyai pandangan yang berbeda tentang proses pertumbuhan suatu perekonomian. Teori-teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok teori yaitu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern, (Wahyuningsih, 2017):

1. Teori pertumbuhan klasik, menurut teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Artinya para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.
2. Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Abramovitas dan solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.
3. Teori pertumbuhan ekonomi modern meliputi teori pertumbuhan Rostow dan Kunznet. Menurut Rostow pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi dari suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui

lima tahapan, yaitu tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan masyarakat berkonsumsi tinggi.

Todaro (2014), secara umum pertumbuhan ekonomi memiliki sumber-sumber utama seperti adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki sumber daya manusia atau memperbaiki kualitas modal dan fisik, yang selanjutnya keberhasilan tingkat kuantitas sumber daya yang produktif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu kegiatan pemerintah untuk mengatur perekonomian yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah disetiap tahunnya yang tercantum pada APBN atau APBD (Sukirno, 2014). Pemerintah dalam mengambil keputusan, memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran dan tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Hal ini dikarenakan besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pendapat para peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih

dalam tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan sebagai keadaan ekonomi yang didalam suatu negara di jenjang periode tertentu, bisa tahunan, semester, maupun triwulan. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya. Indikator dari pertumbuhan ekonomi anantara lain, Soleh (dikutip dalam Susanti, syechalad &Hamzah 2017).

1. Pendapatan Nasional Riil

Untuk mengetahui perubahan terhadap pendapatan nasional riil dan dipakai berbagai negara untuk menilai pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Disuatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional riilnya naik atau meningkat dari periode sebelumnya.

2. Pendapatan Riil Perkapita

Disuatu negara sedang mengalami pertumbuhan jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu.

3. Kesejahteraan Penduduk

Pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut bisa dilihat dari kelancaran pendistribusian barang dan jasa pada negara itu yang berarti terdapatnya peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di semua wilayah.

4. Tenaga Kerja Dan Pengangguran

Sebuah negara disebut negara berkembang jika telah menycapai tingkat pemakaian tenaga kerjanya dengan maksimal atau tingkat pengangguran kurang dari empat persen.

2.1.3 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah dengan cara menghitung Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo, Sendouw & Tatu, 2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu (Arifin, 2007):

1) Metode langsung, dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, sedangkan Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

b) Pendekatan Pendapatan

Metode ini merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penjumlahan dari seluruh penerimaan yang didapatkan dari faktor produksi pada suatu negara dalam periode tertentu.

c) Pendekatan Pengeluaran

Seluruh jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stock dan ekspor neto, di dalam suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Penghitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa diproduksi.

2) Metode Alokasi (Metode Tidak Langsung)

a) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku

Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dinilai dengan harga di tahun yang bersangkutan. NTB atas dasar harga berlaku yang didapat dari pengurangan Nilai Produksi Bruto (NPB/output) dengan biaya masing-masing dinilai atas dasar harga berlaku.

b) Penghitungan Atas Dasar Harga Konstan

Penghitungan atas dasar harga konstan pengertiannya sama dengan penghitungan atas dasar harga berlaku, tetapi penilaiannya dilakukan dengan harga suatu tahun dasar tertentu. Penghitungan atas dasar harga konstan berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau sektoral dan untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun.

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa

menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.

Menurut Sukirno (2008) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN atau APBD (Sukirno, 2008). Dalam mengambil keputusan, pemerintah memiliki banyak pertimbangan untuk mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Besarnya penerimaan/pendapatan pemerintah akan sangat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Hal tersebut

dikarenakan pendanaan pengeluaran pemerintah sendiri berasal dari pendapatan daerah atau pinjaman. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk karena penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi (Todaro, 2004).

Pertumbuhan angkatan kerja termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Ekspor juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena apabila ekspor mengalami peningkatan maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan karena ekspor yang meningkat mengindikasikan permintaan terhadap barang dan jasa di luar negeri lebih besar dari permintaan barang luar negeri di dalam negeri. Dari beberapa pendapat para peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya investasi pemerintah, pertumbuhan penduduk, jumlah angkatan kerja, pengeluaran pemerintah, ekspor dan desentralisasi. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) .

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah,

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan- pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam undang-undang. Otonomi telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi

dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggung jawabannya.

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah telah diserahkan secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu pemerintah Kabupaten dan Kota. “Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan” yaitu (Halim, 2007) :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak “Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. menurut Undang-undang tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan”. Yang merupakan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor .
4. Pajak kendaraan diatas air.
5. Pajak air di bawah tanah.

6. Pajak air permukaan.

Demi rasa keadilan dan asas pemerataan maka Undang-undang mengatur bagi hasil pajak dan realokasi pajak daerah provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Parkir. B. Retribusi

Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
4. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim,2007). Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
 2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN.
 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelomok usaha masyarakat
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah (Halim, 2007). Selanjutnya diantara komponen pendapatan asli daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap perannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004 pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang- Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Adapun undang-undang yang dimaksud Pasal 158 ayat (1) UU No. 32/2004 adalah UU No. 18/1987 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.

Dengan demikian pengaturan secara yuridis tersebut tidak luput untuk dibahas terhadap dinamika perubahan pengaturannya. Di samping landasan hukum berupa undang-undang, patut

ditelusuri secara yuridis peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang “Pajak Daerah” selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 65/2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang “Retribusi Daerah” selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 66/2001.

2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah pendapatan asli daerah (Hertanto & sriyana, 2011). Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun manajerial daerah. Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun demikian untuk daerah kota dan kabupaten di Indonesia belum bisa melaksanakannya (Siagian, 2008).

Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hamid (2011), otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Dalam hal ini kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Santosa & Rahayu, 2005).

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hertanto & Sriyana, 2011).

Pendapatan asli daerah memiliki kaitan terhadap jumlah penduduk, artinya semakin banyak penduduk maka semakin banyak yang bekerja dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Faktor penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini sebagai objek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut salah satunya yang bersumber dari pendapatan daerah (Mayza, Masbar & Nasir, 2015).

Banyak persoalan yang harus diselesaikan dan dipertimbangkan, terutama dalam menggali potensi daerah dan mengembangkan serta mengelola sumber-sumber yang ada di daerah. Langkah-langkah pemerintah daerah dalam upaya memperkecil ketergantungan terhadap pusat, terus dilakukan dengan jalan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini jelas kelihatan dari adanya peningkatan penerimaan dalam komponen-komponen pendapatan asli daerah yang secara riil menunjukkan peningkatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini bukan merupakan suatu hal yang gampang, karena banyak kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, misalnya tingkat perkembangan ekonomi daerah, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita sangat berperan (Hibzon, 2007).

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Halim, 2002). Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 yaitu pengalokasian dana alokasi umum ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relative besar.

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar

alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima dana alokasi umum.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan dana alokasi umum dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Hasil perhitungan dana alokasi umum per provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Rincian dana alokasi umum untuk masing-masing daerah disampaikan oleh dewan pertimbangan otonomi daerah. Penyaluran dana alokasi umum pada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh menteri keuangan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006 menyatakan bahwa: “Pedoman penyusunan APBD bahwa penggunaan Dana Perimbangan DAU agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji & tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi & pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar & pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat”.

Dana alokasi umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Indonesia

yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

2.3.1 Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Umum Secara Nasional Dan Secara Daerah

Secara nasional, penyusunan besaran dana alokasi umum nasional sebesar 26 persen dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN pada hakikatnya mengacu kepada UU Nomor 33/2004 dengan penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Terkait dengan hal tersebut, rumusan formula perhitungan dana alokasi umum tersebut dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dan langkah-langkah kebijakan, yaitu:

1. Periode 2001-2003, rumusan formula perhitungan dana alokasi umum dalam APBN berdasarkan kepada Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen dari penerimaan dalam negeri bersih (penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi).
2. Dalam tahun 2004-2005, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, yaitu ditetapkan sebesar 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari penerimaan dalam negeri bersih.

3. Periode 2006–2012, rumusan formula perhitungan DAU dalam APBN didasarkan kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, yaitu ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah. Pada APBN tahun 2007 dan tahun 2008, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, posisi devisa neto (PDN) merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah yaitu dana bagi hasil, serta belanja yang sifatnya *earmarked* (penggunaannya diarahkan) dan anggaran yang sifatnya in-out (pencatatan anggaran dengan jumlah yang sama pada penerimaan dan belanja). Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangkaantisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi dana alokasi umum setiap tahun.

Selanjutnya, sejak tahun 2009, PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangkaantisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi dana alokasi umum setiap tahun. data penghitungan dana alokasi umum nasional:

Dana alokasi umum nasional pada hakikatnya disusun oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/DJPK, BKF, dan DJA) dan DPR. Sumber data dalam perhitungan besaran dana alokasi umum nasional ini adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan Perpajakan (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan);
- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan)
- c) Dana Bagi Hasil (data bersumber dari Direktorat Penyusunan APBN, DJA, Kementerian Keuangan)
- d) Subsidi pajak (data bersumber dari BKF, Kementerian Keuangan)
- e) Subsidi BBM dan subsidi listrik (data bersumber dari Direktorat PNBPN, DJA, Kementerian Keuangan)

- f) Subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih (data bersumber dari masing-masing KPA terkait

2.3.2. Faktor-Faktor Penentu Dana Alokasi Umum Secara Daerah

Data Penghitungan DAU per daerah Penghitungan alokasi DAU telah menggunakan data yang berdasar pada Pasal 41 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang mengamanatkan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari instansi lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data, termasuk dalam hal penggunaan data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya jika data tidak tersedia.

Alokasi Dasar dalam penghitungan DAU dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan besaran belanja gaji PNSD dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan perbaikan penghasilan PNS antara lain kenaikan gaji pokok, gaji bulan ke-13, formasi CPNSD, dan kebijakan-kebijakan lain terkait penggajian. Adapun data dasar yang digunakan adalah data gaji induk, yang terdiri dari komponen Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan PPh, Tunjangan Beras. Komponen Alokasi Dasar dalam DAU tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD, terlebih untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (Penjabaran dari pasal 32, UU No.33 Tahun 2004).

2.3.3 Tujuan Dana Alokasi

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Fahrunisah, Badjuri, 2017).

- a. Menurut Prakosa (2008), dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak melakukan penelitian ini, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Rori, Luntungan & Niode (2016), dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara), hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

Penelitian juga dilakukan oleh Hendriwiyanto & Guntur (2015), dengan judul pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi pada tahun 2010-2012 di Jawa Timur, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil dengan arah positif selain itu pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh dana alokasi khusus tetapi dengan arah berlawanan atau negatif.

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Amalia, Rizka & Aulya, Vinie (2014), dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah 2010/2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dilakukan oleh Frelistiyani (2010), dengan judul pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel intervensi (studi pada pemerintahan kabupaten/kota di Jawa pada tahun 2006-2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian dilakukan oleh Tahar & Zakhya (2011), dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang didukung oleh kemandirian daerah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian dilakukan oleh Rahmah & zein (2016), dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Penelitian dilakukan oleh Putri (2015), dengan judul analisis pengaruh pendapatana sli daerah, dana alokasi umum dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1
PenelitianTerkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Rizal, Iskandar, & Ritonga (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Di Provinsi Aceh.	Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statitik (BPS) Provinsi Aceh. Variabel pendapatan asli daerah (x1), dana alokasi umum (x2) dan pertumbuhan ekonomi (y)	Pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persamaanya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhanekonomi Pendapatanaslid daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
2	Rori (2016)	Data skunder	pendapatan	Persamaanya

	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Sulawesi Utara)	dalam bentuk atas dasar harga konstan. Independen pertumbuhan ekonomi dan dependen pendapatan asli daerah	asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara	Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
3.	Rahmah & Zein (2016) Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.	Persamaannya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
4.	Putri (2015) Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif	Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi berpengaruh secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	Persamaannya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian.

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5.	Hendriwiyanto (2015) Pengaruh pendapatan daerah asli terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variable mediasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Timur 2010/2012)	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif. Independen pertumbuhan ekonomi dan dependen pendapatan asli daerah	Hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selain itu dana alokasi khusus berpengaruh secara negative terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaanya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhanekonomi Pendapatanasli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
6.	Amalia (2014) Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010/2012)	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif.	Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaanya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhanekonomi Pendapatanasli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
7.	Sugiarthi & Supadmi (2014) Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan silpa pada belanja	Data sekunder dengan pendekatan kuantitatif.	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif secara simultan terhadap	Persamaanya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhanekonomi

	modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi		pertumbuhan ekonomi	onomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
8.	Gunantara & Dwirandra (2014) Pengaruh pendapatan asli daerah dan alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal	Pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persamaannya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian
9.	Tahar & Zakhiya (2011) Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif. Independen kemandirian dan pertumbuhan ekonomi sedangkan dependen pendapatan asli daerah dan dana	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan	Persamaannya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian

		alokasi umum.		
10	Frclistiyani (2010) Pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variable interving (Studi Pada Kabupaten/Kota Sejava Pada Tahun 2006-2008).	Data skunder dengan pendekatan kuantitatif. Independen belanja modal dan dependen dana alokasi umum.	Pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variable interving (Studi Pada Kabupaten /Kota Sejava Pada Tahun 2006-2008).	Persamaanya Variabel dependen dan independennya sama-sama meneliti pertumbuhan ekonomi Pendapatan asli daerah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian dan lokasi penelitian

2.5 Kerangka Berfikir

2.5.1 Kerangka Berfikir

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah untuk diberikan kewenangan dalam memungut pajak/ retribusi dan mengelola sumber daya alam. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum merupakan sumber yang pertama dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat mealalui kerja sama dengan pemerintah daerah (Halim , 2007).

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Melalui belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber

pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan sejumlah output barang dan jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dapat lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal dan ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan seiring dengan meningkatnya produktivitas.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan

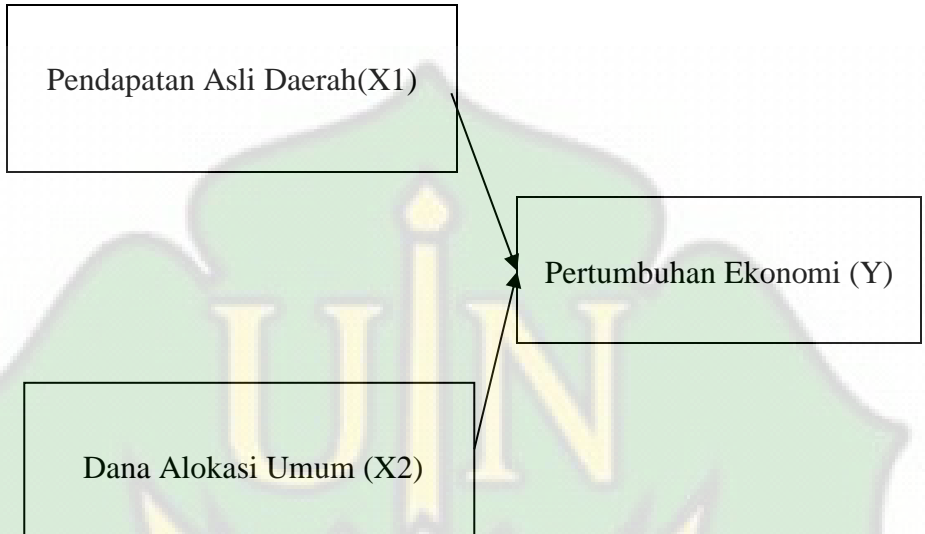
pemerintah (UU No. 23/2014). Penelitian Endrawati, dan Ulfi (2010) menyimpulkan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Produk Domestik Bruto adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan nasional, sedangkan pada level yang lebih rendah biasa digunakan istilah produk domestik regional bruto (PDRB).

Hal ini dapat menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi, berdasarkan

uraian sebelumnya, kerangka pemikiran peneliti dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sinkron dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

Pertumbuhan Ekonomi (Y) sedangkan variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Alokasi Umum (X2), sebagai variabel intervening. Pada kerangka konsep ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen terhadap

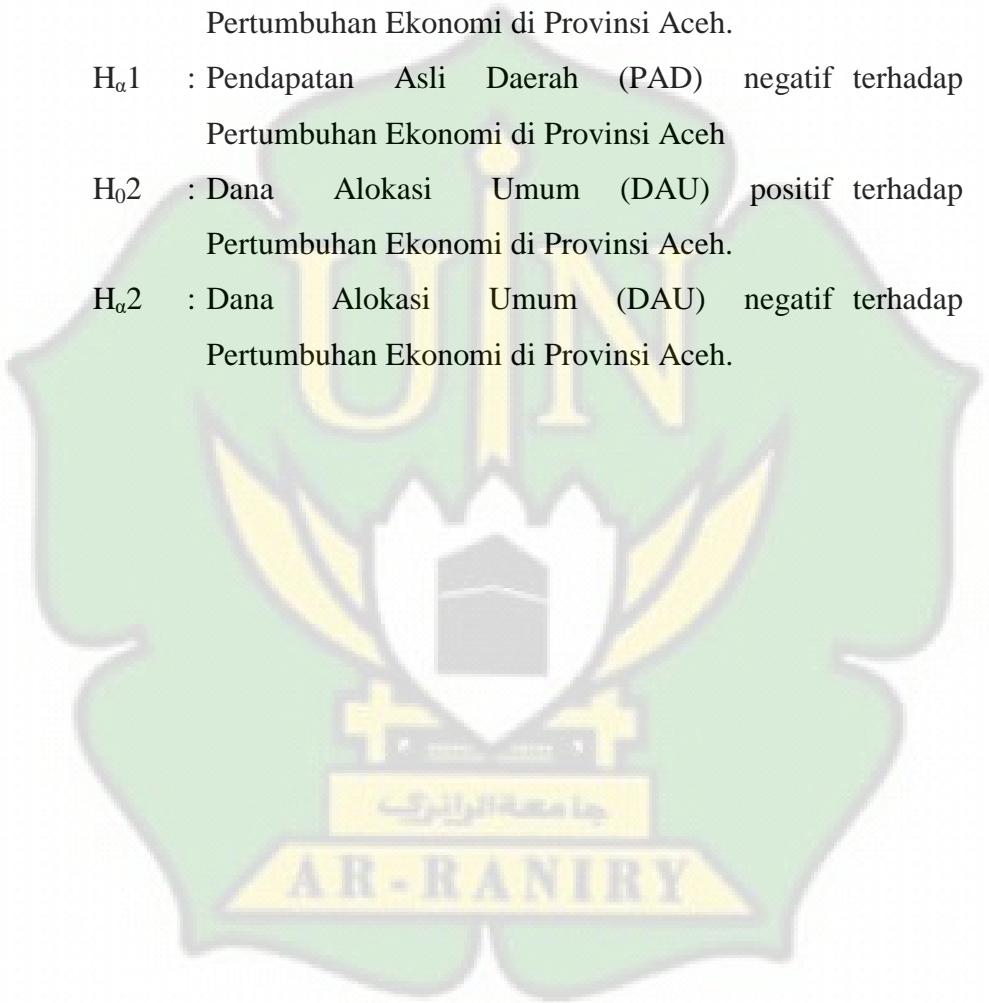
variabel dependen serta dengan variabel intervening dengan uraian berikut:

H_01 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

H_a1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

H_02 : Dana Alokasi Umum (DAU) positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

H_a2 : Dana Alokasi Umum (DAU) negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pada kasus penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif. Metode dalam penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk diteliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2018). Menurut rumusan masalah penelitian menggunakan pendekatan asosiatif yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan yang digunakan adalah kausal yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Adapun data yang diperoleh dalam bentuk data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi dalam bentuk angka-angka.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sepenuhnya telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan adalah *Times Series* dari tahun 1992-2021. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat

Statistik, dokumen-dokumen perusahaan, organisasi atau publikasi lainnya.

Periode yang digunakan adalah padatahun 1992-2021 untuk Provinsi Aceh meliputi data:

- a. Data Pendapatan asli daerah pada Provinsi Aceh Tahun 1992-2021. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan (BPKA) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- b. Data Dana alokasi umum pada Provinsi Aceh tahun 1992-2021. Data ini bersumber dari data (BPS) Provinsi Aceh dan (BPKA) Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- c. Data Pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Aceh tahun 1992-2021. Data ini bersumber dari (BPS) Provinsi Aceh.

3.3 Teknik Pengambilan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa *setting*, berbagai sumber dan berbagai metode (Sugiyono, 2018:156). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sepenuhnya telah dikumpulkan oleh pihak lain, karena data yang secara keseluruhan jenis data sekunder, maka Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*LibraryResearch*) terhadap dokumen atau catatan statistic laporan tahunan yang sudah berlalu yang telah dipublikasi oleh lembaga resmi terkait.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1
Data dan Variabel

Varibel	Skala Pengukuran	Sumber Data
Pendapatan asli daerah(X1)	Rupiah	BPS dan BPKA
Dana alokasi umum(X2)	Rupiah	BPS dan BPKA
Pertumbuhan Ekonomi(Y)	Persen%	BPS

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif yang mengandalkan data berupa nilai dan angka, analisis data dilakukan menggunakan statistik. Bagi penelitian kuantitatif (numerical) tentu saja analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan ukuran-ukuran statistik (Sanjaya, 2015: 296). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji auto kolerasi dengan menggunakan program pengolahan data. Menurut Sugiyono (dikutip dalam Agus, 2020) Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responen, menyajikan data disetiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.5.1 Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (dikutip dalam Hasan, 2017) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Pertumbuhan ekonomi
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2$	= Koefiesien
ε	= Errorterm
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Dana Alokasi Umum

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan satuan data yang akurat, suatu persamaan regresi sebaiknya terbebas dari asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain dengan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian yang dilakukan atas dasar penelitian seluruh keseluruhan pada variabel independen yang terdiri dari

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, adapun jenis pengujian sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan bertujuan untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data ataupun variabel, apakah sebaran data tersebut sudah terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian signifikan koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Untuk menguji apakah residual distribusi normal atau tidak yaitu dengan melakukan uji statistik. Uji statistic sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kalmogorov Smirnov*, Ghozali (2016).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut Ghozali (2016) merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam suatu model regresiter dapat korelasi antara variabel independen atau bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau bebas. Jika variabel independen atau bebas saling berkolerasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal merupakan variabel independen atau bebas yang nilai korelasinya antara sesama variabel independennya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (dikutip dalam Nanincova (2019) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak sama anvarian dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan dalam regresi linier. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periodet-1 menurut Ghozali (2014). Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lain, hal ini sering ditemukan pada *time series*. Pada data *crosssection* masalah auto korelasi relative tidak terjadi. Dalam penelitian ini untuk melihat data terjadi auto korelasi atau tidak menggunakan uji Durbin Watson (D-W) sebagai mana bahwa secara umum bisa diambil patokan pada:

1. Angka D-W dibawah-2 berarti ada auto korelasi positif
2. AngkaD-W dibawah-2 samapa + 2 berarti tidak ada auto

3.5.2 Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (dikutip dalam Hasan, 2017) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	= Pertumbuhan ekonomi
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2$	= Koefisien
ε	= Error term
X_1	= Pendapatan Asli Daerah
X_2	= Dana Alokasi Umum

3.6 Pengujian Hipotesis

Kuncoro (2013:60) mengartikan uji signifikansi digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Uji statistic terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (ujit), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (ujif) dan pengujian koefisien diterminasi (ujiR²).

3.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Ujit)

Ujit digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan beranggapan variabel lain konstan. Uji t yaitu untuk menguji

hubungan regresi secara parsial dan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen berdasarkan tingkat signifikan (Kuncoro 2013).

3.6.2 Uji Sigifikansi Simultan (Ujif)

Ujif menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila $F_{hitung} < F_{table}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, tetapi jika $F_{hitung} > F_{table}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama X^1 , X^2 dan keduanya secara bersamaan mempengaruhi variable Y .

3.6.3 Koefisien Determinasi (RSquare)

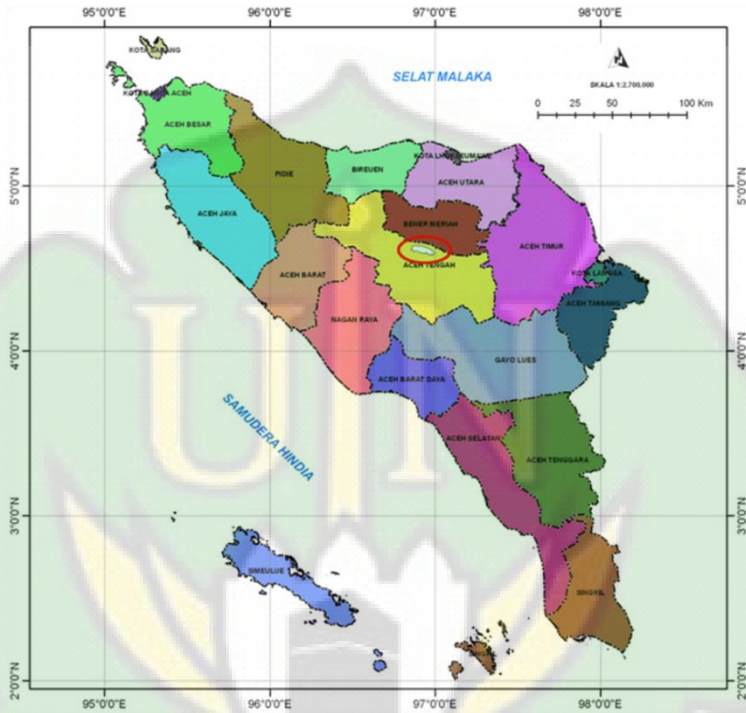
Supranto (dikutip dalam Salombe, 2019) untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan bertujuan untuk melihat atau mengukur sebesar-besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai (R^2) kecil berarti kemampuan menjelaskan variabel-variabel independen terhadap variasi variabel dependen menjadi sangat terbatas. Sebaliknya Nilai (R^2) yang semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Aceh yang terletak di bagian paling barat gugus kepulauan nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad abad sebagai tempat persinggahan menjadikan daerah perdagangan Cina, Eropa, India dan Arab, Sehingga Aceh menjadi daerah pertama masuk budaya dan agama di Nusantara. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.401 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas lahan terkecil yaitu 3.928 ha. Provinsi Aceh dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah administratif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mempunyai 23 jumlah kabupaten/kota 6569 kecamatan pada Provinsi Aceh dan 5,27 juta jiwa penduduk laki laki dan perempuan.

Gambar 4.1
Peta Lokasi Penelitian

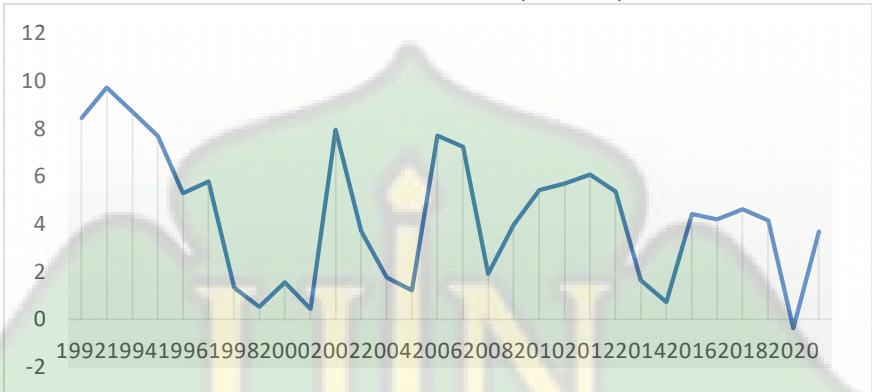


Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi daerah dilihat pada laju dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Berikut data laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh:

Tabel 4.1
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh
Tahun 1992 – 2021 (Persen)



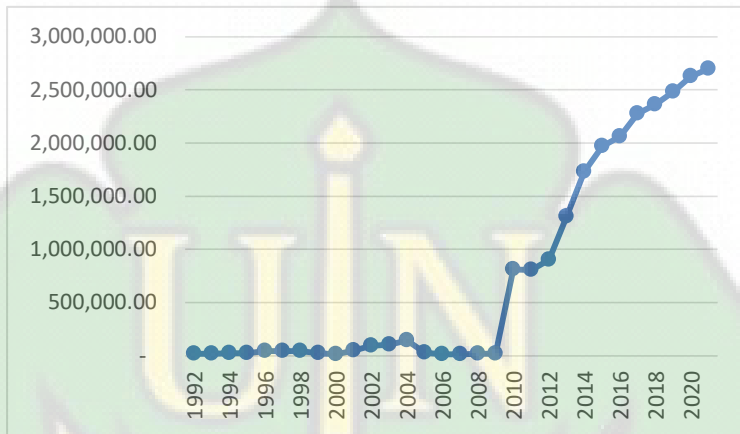
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

4.1.2 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh

Pendapatan asli regional adalah pendapatan dari wilayah sesuai dengan konstitusi dan diatur oleh hukum. Wilayah Aceh memiliki PAD sejak tahun 1990 sampai sekarang. Kehadiran PAD bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan bentuk Wilayah yang didasarkan pada otoritas Kemampuan regional untuk mencapai desentralisasi. Berikut data PAD Provinsi Aceh:

Tabel 4.2

**Tabel Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh
Tahun 1992 – 2021 (Rupiah)**

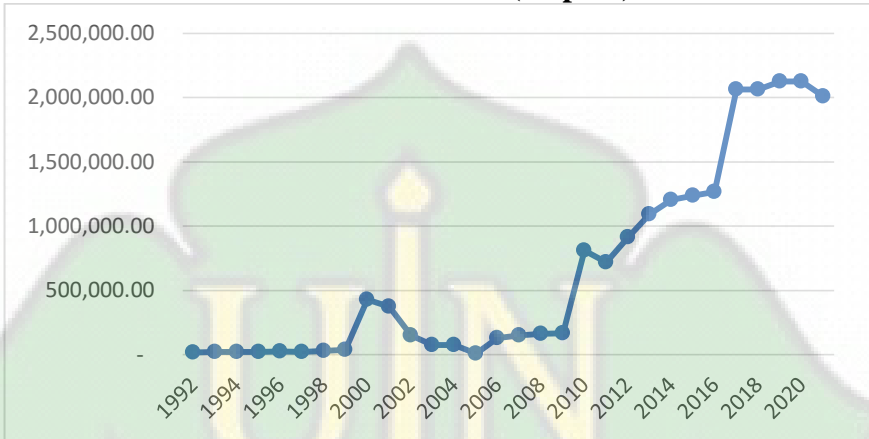


Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

4.1.3 Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diambil dari pendapatan APBN yang dialokasikan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil, Berikut pemaparan data DAU di Provinsi Aceh:

Tabel 4.3
Tabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh
Tahun 2011 – 2021 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022)

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat jika anda menggunakan analisis regresi linier. Uji ini antara lain adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model regresi tidak normal, terjadi multikolinearitas, terjadi heteroskedastisitas atau terjadi autokorelasi. Berikut akan dibahas masing-masing uji asumsi klasik regresi sebagai berikut:

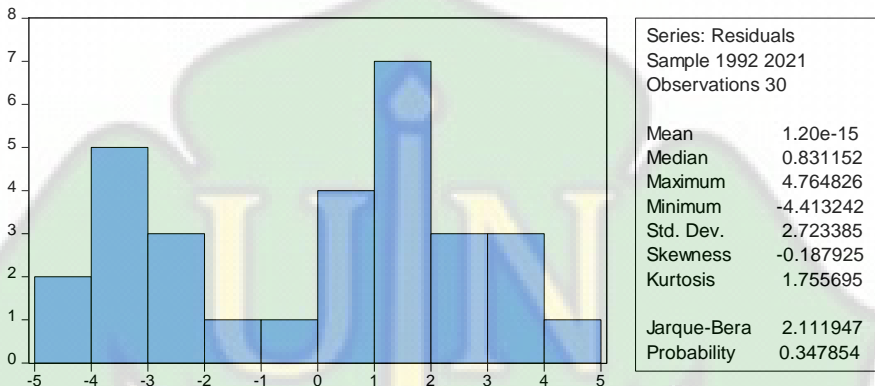
1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdapat atau mempunyai distribusi normal atau dalam kata lain dapat mewakili populasi yang sebarannya normal

(Ghozali, 2014). Pengujian ini menggunakan metode grafik histogram dan uji statistik Jarque-Bera (*JB test*) sebagai berikut:

Gambar 4.1

Uji Normalitas



Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar 0.347854 lebih besar dari nilai signifikan 0.05 atau 5% dengan nilai Jarque-Bera sebesar 2.111947, Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal maka dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam model regresi yang diolah ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2014). Menguji masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000804	1.492521	NA
X1	0.026353	9.163361	2.83432
X2	1.298559	9.813938	2.83143

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil output pengujian multikolinieritas yang tampak pada tabel di atas, dapat dilihat pada tabel Coefficients (nilai Tolerance dan VIF) bahwa dari dua variabel bebas dapat diketahui nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,2, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan saat uji regresi linear. Karena syarat dari uji regresi linear harus tidak boleh ada heterokedastisitas (Ghozali, 2014). Berikut hasil uji nya:

Tabel 4.6
Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	3.018802	Prob. F(2,27)	0.0656
Obs*R-squared	5.482483	Prob. Chi-Square(2)	0.0645
Scaled explained SS	2.906277	Prob. Chi-Square(2)	0.2338

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil dari Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *white* dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima karena hasil nilai probabilitas *Chi-Square* 0,0645 lebih besar dari *alpha* (0.05), atau dengan kata lain nilai koefisien regresi variabel *independen*, sehingga data dalam model regresi ini dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokolerasi

Dalam pengujian ini mempunyai fungsi untuk mengetahui model regresi linier berganda ada kolerasi antar kesalahan pengganggu antar 1 periode dengan t-1 periode. Untuk pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode *Breusch-Godfrey* dimana teknik dalam men regres variabel residual digunakan *autoregressive* dengan simultan. Berikut uji autokolerasi:

Tabel 4.7

Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.584361	Prob. F(2,25)	0.0955
Obs*R-squared	5.139815	Prob. Chi-Square(2)	0.0765

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil dari Uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima karena hasil probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,0765 lebih besar dari *alpha* (0.05), atau dengan kata lain nilai koefisien regresi variabel independen, sehingga data dalam model regresi ini dapat dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan variabel dependennya adalah Pertumbuhan ekonomi. Maka hasil output regresi nya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 07/28/22 Time: 10:36
Sample: 1992 2021
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.962930	0.701179	7.077978	0.0000
X1	3.15E-07	2.51E-06	0.125292	0.9012
X2	5.72E-07	3.26E-06	3.175360	0.0121
R-squared	0.542298	Mean dependent var		4.351000
Adjusted R-squared	0.519431	S.D. dependent var		2.824471
S.E. of regression	2.822450	Akaike info criterion		5.007727
Sum squared resid	215.0880	Schwarz criterion		5.147847
Log likelihood	72.11591	Hannan-Quinn criter.		5.052553
F-statistic	0.020776	Durbin-Watson stat		1.781341
Prob(F-statistic)	0.000003			

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PE = 4.962930 + 3.149588 PAD - 5.722792DAU + e$$

1. Pada nilai konstanta sebesar 4.962930 dengan arti bahwa tanpa adanya kedua variabel dalam penelitian ini maka nilai variabel pertumbuhan ekonomi (Y) mempunyai nilai sebesar 4.962930.
2. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai 3.149588, menandakan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar satu persen, Maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.149588 dengan asumsi *ceteris paribus*.
3. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum -5.722792 menandakan bahwa setiap penurunan tingkat kemiskinan sebesar satu persen, Maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -5.722792 dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T adalah untuk mengetahui pengaruh secara sendiri sendiri ataupun parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melihat nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Tabel distribusi t mencari pada $\alpha = 0.05$ (5%) dengan tingkat derajat kebebasan (df) = $n - k$ dimana n menjadi jumlah data yang digunakan sebanyak 44 data dan k jumlah variabel pada penelitian sebanyak 3 variabel, Sehingga dimasukkan kedalam persamaan menjadi $df = 44 - 3 = 41$, maka t_{tabel} pada nilai 41 ditemukan sebesar = 1.68288

Berdasarkan hasil pencarian pada t_{tabel} diatas maka uji t dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Nilai koefisien PAD mempunyai nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0.125292 < 1.68288$, indikator ini menunjukkan bahwa PAD tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Nilai koefisien DAU mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3.175360 > 1.68288$, indikator ini menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4.4.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.8 dilihat bahwa nilai *Prob (f- statistic)* sebesar $0.000003 < 0.05$ mengartikan bahwa semua variabel bebas independen pada penelitian ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4.4.3 Koefisien Determinasi

Bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel *predictor* yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi, Berdasarkan hasil regresi berganda pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.542, bahwa 54.2% perubahan-perubahan yang terjadi pada terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi akibat pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada penelitian ini, Selebihnya sebesar 45.8% dipengaruhi oleh faktor diluar penelitian.

4.5 Hasil dan Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh sebesar 3.149588 dengan signifikansi sebesar $0.9012 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Gustiana (2014) bahwa variabel pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Megasari (2020) tentang pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara mengutarakan bahwa Pendapatan asli daerah masih belum mampu memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Secara teori pendapatan asli daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini sulit terwujud karena

salah satu pos penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah pajak, dimana pajak dapat mengurangi konsumsi sehingga karena konsumsi berkurang maka penerimaan juga berkurang dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Dilihat dari hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa adanya terdapat pengaruh yang signifikan variabel Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh sebesar 5.722792 dengan signifikansi sebesar $0.0121 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Argo & Nuraini (2017) yang menunjukkan dalam penelitiannya dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila semakin tingginya pengalokasian realisasi DAU yang diberikan dari pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena DAU secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah. Hal ini karena peran dari DAU sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tujuan penting dari alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan

kemampuan penyediaan pelayanan publik antar penda di Indonesia. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi mis alokasi. Penentuan dana alokasi umum dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah. mengindikasi jika terjadi peningkatan dana alokasi umum maka kemandirian suatu daerah akan semakin rendah. Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya dalam bentuk belanja modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh sebesar 7.860793 dengan signifikansi sebesar $0.8985 > \alpha = 0,05$.
2. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa adanya terdapat pengaruh yang signifikan variabel Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh sebesar 4.76234 dengan signifikansi sebesar $0.0179 > \alpha = 0,05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, variabel independen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Dari hasil yang diperoleh pada Provinsi Aceh diharapkan untuk meningkatkan pendapatan pada sumber yang terdapat melalui Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan pengalokasian Pendapatan Asli Daerah agar mengalami peningkatan melalui satu tahun ke tahun selanjutnya dan alokasi untuk belanja daerah juga ikut meningkat dan dapat menciptakan kemandirian daerah. Kemudian pemerintah daerah provinsi Aceh juga perlu mengatur dan dapat menggunakan Dana Alokasi Umum secara tepat sasaran dan lebih baik, dikarenakan Dana Alokasi Umum ini tergolong kedalam salah satu dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat
2. Bagi peneliti berikutnya bisa memakai penelitian ini sebagai acuan penelitian. Hal tersebut karena faktor yang mempengaruhi perekonomian Aceh tidak terbatas semata-mata dalam variabel yang sudah dipakai pada penelitian ini, tetapi masih adanya variabel-variabel lainnya yang relevan dengan keadaan variabel Pendapatan Asli Daerah maka penelitian berikutnya bisa menambahkan atau mengganti variabel yang tidak signifikan dengan variabel yang lebih relevan seperti variabel makroekonomi yaitu nilai tukar, jumlah uang beredar, tingkat pengangguran atau kondisi keamanan di Aceh hingga bisa melakukan percobaan memakai model uji yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Rahmat, H. & Setianto, (2009). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, Jakarta: Selemba Empat
- Amalia, Rizka., S. & Aulya, vinnie. (2014). *Analisis Pengaruh pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi studi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2012''*, (Jurnal ekonomi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015).
- Anita Sri Wahyuni. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. STEI Ekonomi*, XX(Xx), 1–22.
- Argo Fahma A. P, I. N. (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istemewayogyakarta tahun 2011-2016*. Jurnal IlmuEkonomi, 1(2), 163–175.
- Arifin, I. (2007). *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves
- Bastian, I. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesi*: Salemba Empat, Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015. <http://www.bpk.go.id>.
- BadanPusatStatistik.(2017).AcehDalamAngka.BPS.<https://aceh.bps.go.id/publication/2017/08/12/38a9bd5efbf19416f4a0d125/provinsi-aceh-dalam-angka-2017.html>.
- BadanPusatStatistikAceh(2021)<file:///C:/Users/pc/Downloads/BRSbrsInd->
- BadanPusatStatistikAceh(2021)<https://acehselatankab.bps.go.id/indicator/52/64/2/pdrb-pengeluaran-atas-dasar-harga-konstan-tahun-2010-2020.html>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2015. <http://www.bpk.go.id>

Badan Pusat Statistik Aceh (2020)
<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/566/pe-rumbuhan-ekonomi-aceh-tahun-2019.html>

Bappenas Indonesia Triwulan IV 2019
https://www.bappenas.go.id/files/2715/8529/3891/Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_Triwulan_IV_2019.pdf

Bawinti, I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Ekobis Islam* 78-89.

Dahlia. (2018). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 2. No. 2. Aceh

Erlina, & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan.

Erlina, & Rasdianto. (2015). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Badan Penerbit Salemba Empat. Medan.

Endrawati, & Ulfi, M. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi & Manajemen* Vol 5 No.2 Desember 2010 ISSN 1858- 3687.

Fahrunisah, N., & Badjuri, A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*. Semarang

- Frelistiyani, w. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, P. C. & Dwirandra. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.3 ISSN 2302-8556.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. (2009). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah*. edisi pertama. Jakarta:salemba empat
- Halim, A. (2003). *Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 7, No. 1.
- Hamid, A. (2011). *Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Academica Fisip Untad. Vol 03 No. 01
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). *Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Yogyakarta

- Hendriwiyanto, & Guntur. (2015). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*.
- Hasan, E. (2017). Pengaruh Investasi, Angkatan kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera barat. *Jurnal Riset Ekonomi*. 5-14
- Juanda, & Bambang. (2009). *Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan*. IPB Press, Bogor.
- Juanda, Bambang, & Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Hibzon. (2007). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan*. *Jurna Ekonomi Pembangunan*. Sumatera Selatan.
- Kementerian Dalam Negeri RI, 2016. Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2017 Tingkat Nasional.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020). Jakarta Pusat. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Latumaerissa, Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mauludi, A. (2016). *Teknik Belajar Statistik 2*. Jakarta: Alim's Publishing
- Manulusi, R. M., Sinring, B., & Hasbi A.M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana*

Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jurna Ilmu Ekonomi . Vol 4. No.3. Sulawesi Selatan.

Ma'ruf, A., & Wihastuti. (2019) . “*Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol 9. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mayza, M., Masbar, R., & Nasir, M. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Nisa, A. A. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 1 Jilid 2. Hal 203-214.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2016 Tingkat Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Tentang pembagian DAU.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang penyusunan APBD.

Prakosa, K. B. (2008). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. JAA VOLUME 8 NO.2. Jawa Tengah

Putera, E. R. (2016). *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal*. Sosiohumaniora, Volume 18 No, 3 November 2016 : 261-269. Bandung

Putri, E. P. (2015). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol 5, No. 5. Jakarta.

Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Rahmah , AR,. & Drs. Basri, Z. M.Si, Ak, CPA. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh, Periode 2011-2014*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA) Vol. 1, No. 1 (2016). Aceh

Ratmono, I. G. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol.7, No. 2.

- Rizal, Y., Iskandar, & Ritonga, D. W. (2021). *Aanalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomika. Langsa
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rori, C. F., Luntungan, Y., & Niode, A.O.(2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Manado
- Salombe, R. (2019). Pengaruh Pengembangan Karir, Kesejahteraan Dan Konflik Terhadap Moral Kerja Pegawai Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 691–700.
- Santosa,. Budi, P.,& Rahayu, F.R. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-kaktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol 3, No.1.
- Saptaningsih, S. (2009).*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota*.
- StatistikeuanganPemerintahProvinsiAceh(2020)<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- StatistikKeuanganPemerintahDaerahProvinsiAceh(2020)
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>Suwanda, Dadang, Henri Santoso, 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP*. Badan Penerbit Rosda. Bandung.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, . Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2015). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*.
- Sasana, H. (2005). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Studi Kasus di kabupaten Banyumas. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2, No.1.*
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomikal. Vol 1, No. 2. Universitas Samudra Langsa Aceh.*
- Siagian, M. (2008). *pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah terhadap Belanja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Jurnal Studi Ekonomi, Vol 2, No. 2.*
- Soleh, A. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kemiskinan. Universitas Dehasen Bengkulu.*
- Sukirno, S. (2014). *Makro Ekonomi Modern*. Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Supartoyo, Sendouw, H. E. R, & Tatum, J. (2013). *The Economic Growth and TheRegional Characteristics: The Case of Indonesia*. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol.16, No.1, Juli 2013.*
- Subanti, S. & Arif R. H. (2014). *Ekonometri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- susanti, h., nur syechalad, m., & hamzah, a. (2017). *analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah Aceh terhadap pendapatan asli daerah provinsi*

aceh setelah stunami. Jurnal Ekonomi dan kebijakan publik indonesia , 2.

Sugiardi, R.D., & Supadmi, L. N. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderas. Jurnal Akutansi Universitas Udayana*

Sebastiania., & Cahyo, H. (2016). *Analysis of Economic Performance as the Independence Indicators of Government in East Java Province. Review of Integrative Business & Economics Research, 5 (2): 272-285.*

Tahar, A., & zakhiya, M. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Akutansi dan Investasi Vol. 12 NO. 1. Yogyakarta*

Taras, T., & Artini, S. G. L. (2017). *Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 5, 2017 : 2360-2387. Bali*

Tambunan, T. (2004). *Perekonomian Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.*

Todaro, M. P., & Stephen, C. S.(2014).*Pembangunan Ekonomi 2 di dunia ketiga edisi kedelapan.*Badan Penerbit Erlangga. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

- Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021.
- Warsito, (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada
- Wahyuni, A. S. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta*. Jurnal STEI Ekonomi, Vol XX, No XX, Juli 2020. Jakarta
- Wahyuningsih, D.D. (2017). *Teori Manajemen Dalam Bimbingan dan Konseling: Klasik, Neo-Klasik dan Modern*. Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.
- Wibowo, E. (2008). *Perencanaan Dan Strategi Pembangunan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol.8, No. 1. Surakarta
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia, Jakarta.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yani Rizal, Iskandar, & Devra Wati. (2021). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomika, 5(1), 56–67.

Lampiran 1

Data Dau, PAD dan Belanja Daerah Tahun 2011 sampai 2021

Tahun - Kuartalan	Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum
2011Q1	6.48	198.-	166.-
2011Q2	6.27	199.-	174.-
2011Q3	6.01	202.-	183.-
2011Q4	5.94	206.-	194.-
2012Q1	6.11	204.-	210.-
2012Q2	6.21	215.-	222.-
2012Q3	5.94	231.-	234.-
2012Q4	5.87	252.-	245.-
2013Q1	5.54	289.-	259.-
2013Q2	5.59	314.-	269.-
2013Q3	5.52	340.-	278.-
2013Q4	5.58	366.-	286.-
2014Q1	5.12	400.-	293.-
2014Q2	4.94	424.-	299.-
2014Q3	4.93	445.-	303.-
2014Q4	5.05	462.-	307.-
2015Q1	4.83	476.-	306.-
2015Q2	4.74	489.-	309.-
2015Q3	4.78	499.-	311.-
2015Q4	5.15	507.-	312.-
2016Q1	4.94	502.-	283.-
2016Q2	5.21	509.-	297.-
2016Q3	5.03	519.-	323.-
2016Q4	4.94	530.-	361.-
2017Q1	5.01	554.-	472.-
2017Q2	5.01	565.-	509.-
2017Q3	5.06	575.-	534.-
2017Q4	5.19	582.-	546.-
2018Q1	5.07	581.-	512.-
2018Q2	5.27	586.-	514.-
2018Q3	5.17	593.-	516.-
2018Q4	5.18	600.-	519.-

2019Q1	5.06	607.-	523.-
2019Q2	5.05	616.-	528.-
2019Q3	5.01	625.-	534.-
2019Q4	4.96	634.-	541.-
2020Q1	2.97	645.-	310.-
2020Q2	-5.32	520.-	485.-
2020Q3	-3.49	450.-	720.-
2020Q4	-2.19	669.-	446.-
2021Q1	-1.89	599.-	523.-
2021Q2	2.56	690.-	458.-
2021Q3	2.82	520.-	496.-
2021Q4	2.79	597.-	584.-

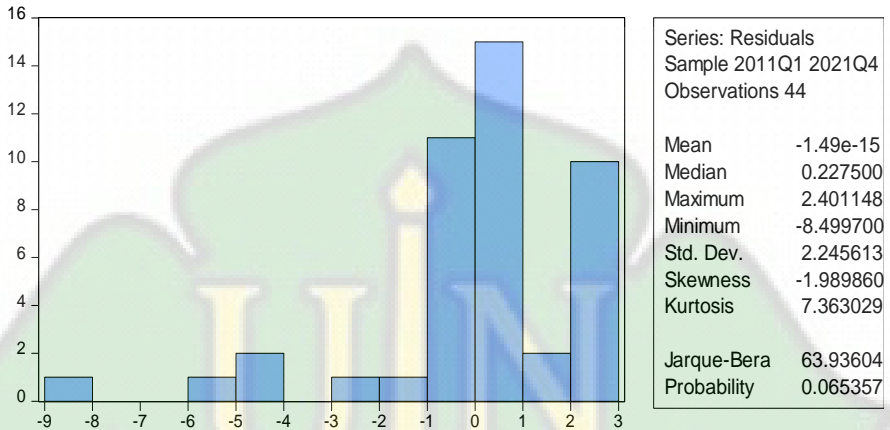
Lampiran 2 Hasil Regresi Data Time Series

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/30/22 Time: 09:56
Sample: 2011Q1 2021Q4
Included observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.860793	1.147625	6.849619	0.0000
X1	4.74E-13	3.70E-12	0.128302	0.8985
X2	-9.92E-12	4.02E-12	-2.465984	0.0179
R-squared	0.559306	Mean dependent var		4.318409
Adjusted R-squared	0.533175	S.D. dependent var		2.591322
S.E. of regression	2.283931	Akaike info criterion		4.555420
Sum squared resid	213.8700	Schwarz criterion		4.677069
Log likelihood	-97.21923	Hannan-Quinn criter.		4.600533
F-statistic	7.176749	Durbin-Watson stat		0.468043
Prob(F-statistic)	0.002126			

Lampiran 3

Uji Normalitas



Lampiran 4

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
 Date: 05/30/22 Time: 10:02
 Sample: 2011Q1 2021Q4
 Included observations: 44

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.317043	11.10929	NA
X1	1.37E-23	27.78520	2.561533
X2	1.62E-23	22.21609	2.561533

Lampiran 5

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.874996	Prob. F(5,38)	0.1217
Obs*R-squared	8.707109	Prob. Chi-Square(5)	0.1213
Scaled explained SS	25.17599	Prob. Chi-Square(5)	0.0001

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/30/22 Time: 10:02

Sample: 2011Q1 2021Q4

Included observations: 44

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41.05895	28.44144	-1.443631	0.1570
X1^2	3.43E-22	2.17E-22	1.582497	0.1218
X1*X2	-4.48E-22	2.90E-22	-1.545474	0.1305
X1	-2.04E-10	1.35E-10	-1.514643	0.1381
X2^2	-2.29E-22	1.90E-22	-1.205544	0.2354
X2	4.81E-10	2.69E-10	1.786348	0.0820

R-squared	0.197889	Mean dependent var	4.860683
Adjusted R-squared	0.092348	S.D. dependent var	12.68906
S.E. of regression	12.08897	Akaike info criterion	7.948587
Sum squared resid	5553.440	Schwarz criterion	8.191886
Log likelihood	-168.8689	Hannan-Quinn criter.	8.038814
F-statistic	1.874996	Durbin-Watson stat	1.720373
Prob(F-statistic)	0.121684		

Lampiran 6

Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	36.99299	Prob. F(2,39)	0.9238
Obs*R-squared	28.81227	Prob. Chi-Square(2)	0.9683

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/30/22 Time: 10:01

Sample: 2011Q1 2021Q4

Included observations: 44

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.040555	0.692915	-0.058528	0.9536
X1	-5.69E-12	2.48E-12	-2.289925	0.0275
X2	7.15E-12	2.74E-12	2.610836	0.0128
RESID(-1)	1.073785	0.166291	6.457275	0.0000
RESID(-2)	-0.314440	0.162394	-1.936281	0.0601
R-squared	0.654824	Mean dependent var		1.31E-15
Adjusted R-squared	0.619422	S.D. dependent var		2.230184
S.E. of regression	1.375823	Akaike info criterion		3.582627
Sum squared resid	73.82271	Schwarz criterion		3.785375
Log likelihood	-73.81778	Hannan-Quinn criter.		3.657816
F-statistic	18.49649	Durbin-Watson stat		2.011384
Prob(F-statistic)	0.000000			